

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA ISTERI DALAM PENETAPAN ITSBAT NIKAH POLIGAMI PADA PENGADILAN AGAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA\*

Hartini\*\*

## ABSTRACT

*Some Procedures and conditions to do polygamy marriage are regulated on Marriage Act and Islamic Law Compilation (KHI), but in practice, the regulations are often disobeyed. This disobedience causes illegal marriage polygamy cases. Ironically, the polygamist exerted the marriage in order to get legalization by itsbat nikah polygamy at Religious Court.*

*The aims of this research are to find out what are the reason of judges on deciding polygamy itsbat case and what are the law protection to wives on itsbat nikah polygamy.*

*The research was conducted in Special Province of Yogyakarta by conducting document studies and interview to the judges at Religious Court in Yogyakarta Special Province. The data were analyzed qualitatively.*

*The research shows that the illegal marriage polygamy which is in accordance to the regulation of marriage Islamic law (Hukum Munakahat) can be legalized by itsbat eventhough there are violations of rule and procedures. The judge's reason are that there are fullfilment materiil conditions, for maslahat principle and give law certainty. Legally, polygamy itsbat gives certainty and protection to wives and their children, eventhough the rights of the first wife and their children sometimes slighted.*

## I. Latar Belakang Masalah

Sekalipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menganut asas perkawinan monogami, akan tetapi apabila ketentuan suatu hukum dan agama tertentu mengijinkan, maka seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang dengan memenuhi syarat tertentu dan diijinkan oleh pengadilan. Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, sebenarnya merupakan syarat dan

sekaligus ketentuan yang dapat dijadikan sebagai argumentasi yuridis boleh atau tidaknya seorang suami melakukan perkawinan yang berikutnya.

Adapun syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh UUP dan peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memungkinkan seorang suami untuk menikah lagi adalah bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat

\* Laporan Penelitian Dana Anggaran Masyarakat UGM Tahun 2003.

\*\* S.H., Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

<sup>1</sup> Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 6.

cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Di samping itu masih dipersyaratkan adanya persetujuan lisan dan/atau tertulis dari isteri yang terdahulu yang disampaikan di depan sidang Pengadilan Agama, adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan lahir dan batin terhadap isteri dan anak-anaknya, serta adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.

Apabila dicermati lebih lanjut, sebenarnya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang akan beristeri lebih dari seorang dapat dikatakan cukup ketat dan berat. Namun ironisnya, konsekuensi yuridis atas terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut kurang mendapat pengaturan yang proporsional dan komprehensif, terutama menyangkut penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan terhadap masalah terkait. Implikasi lebih lanjut adalah munculnya kasus-kasus perkawinan lebih dari seorang isteri yang dilakukan tanpa memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai jalan pintas untuk terlaksananya perkawinan tersebut. Kondisi ini justru diperparah dengan berbagai upaya untuk mengukuhkan eksistensi perkawinan tersebut melalui lembaga itsbat nikah yang ada di Pengadilan Agama sebagai upaya legalisasi terhadapnya. Upaya ini dalam praktik lazim disebut sebagai itsbat nikah poligami.

Adanya fenomena tersebut tidak saja merupakan indikasi adanya pelecehan terhadap ketentuan perundang-undangan, akan tetapi juga sebagai suatu tindakan semena-mena oleh suami terhadap hak-hak dari isteri terdahulu beserta hak anak-anaknya. Seolah tidak ada perbedaan antara seseorang yang dengan patuh mengikuti segala ketentuan hukum

dengan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam rangka menciptakan suatu peristiwa hukum, karena toh pada akhirnya peristiwa hukum tersebut mempunyai nilai yang sama, yaitu sebagai suatu peristiwa hukum yang sah.

## II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Alasan-alasan apa yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Agama sebagai pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan itsbat nikah poligami?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para isteri dengan adanya penetapan itsbat nikah poligami?

## III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Pengaturan Praktik Poligami

Poligami atau mempunyai isteri dari seorang sudah ada pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat penjuru dunia sejak dahulu. Bangsa Arab bahkan menerapkan poligami jauh sebelum Islam datang, begitu pula halnya dengan bangsa lain di kawasan dunia pada masa itu. Pada masa Arab pra-Islam, poligami dilakukan dengan tanpa ada batas. Dengan datangnya Islam, poligami yang tanpa batas kemudian dibatasi dengan maksimal empat isteri saja pada waktu bersamaan. Poligami ini boleh dilaksanakan dengan persyaratan khusus beserta sejumlah ketentuan lainnya.

Satu-satunya ayat Al-Qur'an yang dipandang mengatur tentang poligami adalah ketentuan dalam Surat An-Nisa ayat 3 yang artinya sebagai berikut:

*Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu*

<sup>2</sup> A. Rahman I Doi, 1996, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 259

senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya (Q.S. An-Nisa (4): 3)

Ayat tersebut jelas tidak menganjurkan orang berpoligami, tetapi hanyalah memberi izin, itupun dengan syarat yang sangat ketat. Ironisnya, ayat di atas sering dijadikan landasan isu bahwa Islam merupakan agama wahyu satu-satunya yang membolehkan poligami.<sup>3</sup> Padahal, dalam kenyataannya baik kitab suci kaum Yahudi maupun Nasrani menunjukkan bahwa poligami tidak terlarang dalam kitab mereka. Di zaman dahulu, poligami merupakan perbuatan yang sah di kalangan para Nabi dan raja-raja Bani Israil.

Ayat di atas seringkali dijadikan sebagai alasan untuk menjustifikasi tindakan untuk menikah lebih dari seorang, sekalipun syarat-syarat untuk melakukan poligami tidak terpenuhi. Padahal, ayat di atas secara lebih khusus merujuk kepada keadilan yang harus dilaksanakan terhadap anak-anak yatim. Ayat tersebut turun tidak lama setelah Perang Uhud, ketika umat Islam dibebani dengan banyaknya anak yatim, janda dan tawanan perang. Oleh karenanya, pelaksanaan poligami itu diatur dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Menurut Sayyid Sabiq, berpoligami itu hukumnya bukan wajib dan bukan sunnah, tetapi oleh Islam dibolehkan.<sup>4</sup> Walaupun hukum asal beristeri lebih dari seorang adalah boleh, namun apabila hal tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh syariah, maka hukumnya bisa menjadi haram. Allah SWT membolehkan

berpoligami dengan batas maksimal empat orang isteri dan mewajibkan untuk berlaku adil kepada mereka dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian serta sesuatu yang bersifat kebendaan tanpa membeda-bedakan isteri. Apabila suami khawatir berbuat zhalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka, maka haram baginya untuk melakukan poligami.

Dalam rangka menjadikan pelaksanaan poligami yang mendatangkan kemaslahatan, para ulama dan fuqaha telah berusaha menetapkan pembatasan-pembatasan berupa persyaratan-persyaratan tertentu apabila seorang lelaki muslim hendak melakukan pernikahan lebih dari seorang isteri, yaitu:

1. Seorang laki-laki harus mempunyai kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri yang dinikahi;
2. Seorang laki-laki harus memperlakukan semua isterinya dengan adil, termasuk dalam memenuhi hak-haknya dalam perkawinan;
3. Jumlah wanita yang dinikahi tidak boleh lebih dari empat orang;
4. Wanita yang akan dinikahi seyogyanya adalah wanita yang mempunyai anak yatim;
5. Tidak ada halangan bagi wanita-wanita tersebut untuk dinikahi, baik karena hubungan darah, hubungan susuan atau karena hubungan semenda.

Sebagai akibat penjajahan, banyak negeri-negeri Islam yang mulai melakukan pembatasan-pembatasan berkenaan dengan praktik poligami dengan mengintegrasikannya ke dalam ketentuan hukum positif. Pembatasan tersebut antara lain dilakukan oleh Syria pada tahun 1953 melalui Dekrit nomor 59 Tahun 1953,

<sup>3</sup> Rif'at Syauqi Nawawi, "Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami", dalam Chuzaimah T. Yanggo, 1994, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 104

<sup>4</sup> A. Rahman I Doi, *op.cit.*, hlm. 261

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, 1993, *Fiqih Sunnah*, Jilid Keenam, Al-Ma'arif, Bandung, hlm. 159.

<sup>6</sup> A. Rahman I Doi, *loc.cit.*, Lihat juga Soemiyati, *op.cit.*, hal. 75-76.

yang antara lain menentukan bahwa hakim dapat menolak untuk memberikan izin poligami apabila seorang suami dianggap tidak memenuhi syarat untuk beristeri lebih dari seorang.<sup>7</sup> Selanjutnya, orang yang melanggar ketentuan ini dianggap bersalah dan dapat dikenai suatu sanksi. Syria merupakan negara yang pertama kali melakukan pembatasan-pembatasan dalam hal poligami dan selanjutnya diikuti oleh negara-negara lain seperti Tunisia, Maroko, Irak dan Pakistan, namun hanya Syria dan Tunisia yang sama sekali melarang poligami, sementara yang lain hanya melakukan pembatasan-pembatasan dalam pelaksanaannya.

Menurut Azhar Basyir, untuk menjaga agar kebolehan kawin poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam atas dasar *mashlahah-mursalah*, negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak berkecenderungan untuk menutup sama sekali pintu poligami.

Kecenderungan terakhir inilah yang diikuti oleh Indonesia dengan pengaturannya dalam perundangan nasional tentang perkawinan seperti tampak dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Ditentukan bahwa beristeri lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang (Pasal 55 KHI). Seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, harus mempunyai alasan-alasan yang kuat untuk itu, yaitu karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan (Pasal 57 KHI jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 4 ayat (2) UUP). Ketiga alasan di atas merupakan suatu syarat alternatif. Sedangkan

syarat kumulatif yang harus dipenuhi adalah harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Sementara itu, izin baru dapat diperoleh apabila dipenuhi syarat-syarat: adanya persetujuan dari isteri-isteri terdahulu, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (Pasal 55 ayat 2, Pasal 56 ayat (2), Pasal 58 ayat (1) KHI jo Pasal 40, Pasal 41 huruf b, c, d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 5 ayat (1) UUP).

Perundang-undangan perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara komprehensif dan proporsional apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat untuk beristeri lebih dari seorang. Satu-satunya pasal yang mengatur mengenai sanksi adalah ketentuan Pasal 45 huruf a PP No. 9 Tahun 1975, yaitu dalam hal adanya pelanggaran terhadap Pasal 40 PP tersebut, dalam hal ini tidak adanya izin dari Pengadilan Agama dalam hal seseorang beristeri lebih dari seorang, maka kepadanya akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7. 500,00.

Dalam praktik, ketentuan sanksi ini tidak efektif untuk diterapkan terhadap orang-orang yang beragama Islam karena di samping rendahnya sanksi yang sudah tidak sesuai dengan rasa keadilan, juga tidak ada kepastian mengenai siapa yang berwenang menerapkan sanksi tersebut, apakah kewenangan absolut dari Pengadilan Umum ataukah Pengadilan Agama.

Logikanya, ketika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seorang suami tidak dapat melangsungkan pernikahan berikutnya. Akan tetapi, seringkali para pihak melakukan penyelundupan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Dalam praktik, seringkali dilakukan oleh laki-laki yang berprofesi sebagai Pegawai

<sup>7</sup> Tahir Mahmood, 1972, *Family Law Reform in The Muslim World*, Tripathi, Bombay, hlm. 85-87.

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 39-40

Negeri Sipil atau anggota Angkatan Bersenjata. Karena, mengetahui adanya beberapa halangan birokratis, terutama persetujuan dari isteri, ijin dari atasan dan Pengadilan yang akan sulit diperoleh tanpa adanya alasan yang jelas untuk melakukan pernikahan lagi, maka para pihak mengambil jalan pintas dengan menikah *sirri*, tanpa dilakukan di hadapan PPN.

Selanjutnya setelah halangan yang bersifat birokratis tersebut hilang, terutama setelah mereka memasuki masa pensiun, barulah pernikahan yang dahulunya dilakukan secara *sirri* dan belum tercatat, kemudian diajukan *itsbat nikahnya* ke Pengadilan Agama agar mendapatkan pencatatan dan bukti otentik di Kantor Urusan Agama.

Kasus yang muncul dalam praktik adalah perkawinan yang telah disahkan itu sebelumnya hanya memenuhi ketentuan hukum Islam tetapi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974. Suami menikah lagi tanpa izin dari isteri pertama dan telah memiliki anak-anak. Seharusnya jika ingin melakukan poligami, suami mendapat persetujuan isteri pertama, izin dari atasannya dan lain-lain. Dalam kasus ini hal-hal tersebut telah dilanggar. Isteri memberikan persetujuan setelah perkawinan kedua berlangsung dan terkesan dipaksakan. Padahal sebelumnya isteri tidak memiliki alasan yang menyebabkan suami harus menikah lagi, misalnya isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak mempunyai keturunan, atau cacat.

## 2. Pengertian dan Dasar Hukum *Itsbat Nikah*

Dari kacamata etimologi kata *itsbat* berasal dari kata *atsbata* (*fi'il madli muta'addi* yang berarti menetapkan, mengekalkan, dan mengukuhkan), lalu *itsaban* (bentuk *isim* yang berarti penetapan, pengekalan dan pengukuhan)<sup>9</sup> Dengan demikian *itsbat nikah* berarti penetapan, pengukuhan, atau pengekalan

terhadap (perbuatan) nikah (yang telah dilakukan sebelumnya).

Dari segi terminologi, *itsbat nikah* berarti penetapan atau pengukuhan secara sah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama terhadap suatu perkawinan yang secara faktual sah menurut hukum materiil tetapi belum sah menurut hukum formil, dan karenanya tidak mendapatkan (bukti) berupa buku nikah atau petikan Akta Nikah.

Lembaga *itsbat nikah* sesungguhnya sudah melembaga dan menjadi kewenangan peradilan agama jauh sebelum diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini terlihat dalam Himpunan Penetapan dan Putusan Pengadilan Agama tahun 50-an, yang salah satu jenis perkaranya adalah menyangkut pengesahan nikah. Selanjutnya setelah diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1974, lembaga ini secara implisit masih diakui keberadaannya, yaitu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 64 UUP yang menyatakan bahwa "untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah". Ini mengindikasikan adanya lembaga pengesahan nikah yang tidak lain tentunya *itsbat nikah*. Demikian juga dengan berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) bahwa salah satu kewenangan Peradilan Agama di bidang perkawinan adalah menyangkut pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.

Keberadaan lembaga *itsbat nikah* tersebut terkait pula dengan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa jika kantor yang dahulu mengeluarkan surat-surat (Akta Nikah), tidak

<sup>9</sup> Bisri Adib, 1999, *Kamus Bahasa arab Al Bisri*, Pustaka Progresif, Surabaya, hlm. 56.

bisa membuat duplikatnya karena catatannya telah rusak atau hilang karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak dan rujuk harus dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama. Peraturan Menteri Agama tersebut dikeluarkan berkaitan dengan keharusan adanya penetapan nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974.<sup>10</sup> Dengan demikian, lembaga itsbat nikah yang dimaksudkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 7 Tahun 1989 adalah terbatas pada alasan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam, masalah itsbat nikah ini diperluas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KHI bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (3) ditentukan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- (b) Hilangnya Akta Nikah.
- (c) Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan.
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.

Secara sepiantas, rumusan KHI dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang melakukan perkawinan di bawah tangan termasuk perkawinan poligami di bawah tangan (poligami liar). Karena walaupun perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, tetapi dapat diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama

guna memperoleh penetapan dari Pengadilan agama.

Sebagaimana diketahui, bahwa sejak berlakunya UUP yang berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975, maka konsekuensinya sejak tanggal tersebut semua perkawinan baik perkawinan pertama, kedua dan seterusnya dalam UUP jo PP Nomor 9 Tahun 1975. Apabila dilakukan perkawinan setelah tanggal tersebut serta tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, seperti perkawinan di bawah tangan atau poligami liar, tentunya dianggap telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Alasan-alasan Hakim sebagai Pertimbangan dalam Memutus Perkara Itsbat Nikah Poligami

Dalam praktik, ada kalanya pengajuan itsbat nikah berkaitan dengan adanya perkawinan poligami di bawah tangan. Terhadap pengajuan itsbat nikah dengan isteri kedua, ketiga dan seterusnya tersebut, sekalipun menurut hukum telah terjadi pelanggaran mengenai syarat poligami, hakim tidak serta-merta menolak permohonan tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onwankeljk*), bahkan sebaliknya, sebagian besar permohonan terhadap itsbat tersebut dikabulkan. Dengan demikian terhadap permohonan itsbat nikah poligami, ada dua kemungkinan putusan yaitu permohonan dikabulkan atau permohonan ditolak.

Dalam hal terjadi itsbat nikah poligami, Pengadilan Agama akan memeriksa syarat-syarat poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 55-59 KHI, Pasal 3,4,5 UUP dan Pasal 40-44 PP Nomor 9 tahun 1975. Namun sebelumnya akan dilihat mengenai terpenuhi tidaknya rukun-rukun perkawinan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP.

<sup>10</sup> Damsyi Hanan, "Permasalahan Itsbat Nikah", *Mimbar Hukum* No. 31 Tahun VIII 1997, hlm. 76.

Dalam kasus itsbat nikah poligami sebenarnya telah terjadi pelanggaran terhadap dua prosedur pernikahan yaitu melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama dan melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN). Pada prinsipnya ijin pengadilan dimaksudkan untuk memeriksa apakah seorang suami telah memenuhi syarat untuk beristeri lebih dari seorang. Sementara pelaksanaan akad nikah di hadapan PPN dimaksudkan untuk memeriksa apakah para pihak telah memenuhi syarat-syarat dalam pelaksanaan perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian, dari tiga Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Bantul, diperoleh enam putusan itsbat nikah poligami. Dari keenam putusan tersebut, lima permohonan itsbat nikah dikabulkan dan satu permohonan ditolak, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Dari kelima putusan dan penetapan itsbat nikah poligami yang dikabulkan, sesungguhnya hanya satu perkara yang memenuhi syarat bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang yaitu karena isteri tidak dapat memberikan keturunan (Putusan Nomor 152/Pdt.G/2001/PA.Btl). Selebihnya tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan poligami.

Adapun alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan itsbat nikah poligami adalah:

#### a. Terpenuhinya ketentuan syarat materiil perkawinan.

Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) UUP, bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama (dari pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut). Dalam konteks perkawinan Islam, ketentuan hukum Islam menentukan rukun perkawinan terdiri dari calon suami dan calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul [Pasal 14 KHI]. Hukum Islam juga menentukan adanya larangan perkawinan antara dua orang yang memiliki pertalian nasab, kerabat semenda, pertalian susuan atau karena keadaan tertentu sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, 9, 10 dan 11 UUP, Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 KHI. Sehingga apabila perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan-halangan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal tersebut, maka itsbat nikahnya dapat dikabulkan.

Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada kitab *I'nnatut Tholibin* juz IV halaman 254 yang artinya: *Dan di dalam pengakuan seorang laki-laki atau perkawinannya dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.* Dengan telah terbukti sahnya perkawinan menurut hukum Islam, maka itsbat nikah poligami tersebut dapat dikabulkan.

**Tabel Daftar Putusan Itsbat Nikah Poligami**

No	Nomor Putusan	Pengadilan Agama	Keterangan
1	156/Pdt.G/2001/PA.Smn	Sleman	Dikabulkan
2	471/Pdt.G/2001/PA.Smn	Sleman	Dikabulkan
3	377/Pdt.G/2002/PA.Smn	Sleman	Ditolak
4	07/Pdt.G/1998/PA.Yk	Yogyakarta	Dikabulkan
5	20/Pdt.P/1997/PA.Btl	Bantul	Dikabulkan
6	152/Pdt.G/2001/PA.Btl	Bantul	Dikabulkan

Sumber: Data Sekunder Pengadilan Agama Sleman, Yogyakarta, dan Bantul, 2003.

#### **b. Mengacu pada unsur kemaslahatan**

Setelah perkawinan memenuhi syarat materiil, maka pertimbangan selanjutnya untuk mengabulkan itsbat nikah adalah demi kemaslahatan, keadilan moral dan keadilan sosial para pihak. Hakim berpendapat bahwa menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga merupakan hak isteri juga merupakan hak suami dan hak anak-anak mereka. Mengingkari hak-hak seperti itu berarti mengingkari tujuan hakiki perkawinan yang berarti mengabaikan kemaslahatan serta mengandung kemudharatan bagi orang lain. Oleh karenanya dituntut kerelaan dan kesediaan dari isteri sebelumnya untuk berbagi kebahagiaan dengan isteri-isteri dan anak-anak lainnya. Tujuan kemaslahatan yang menjadi pertimbangan para hakim ini tidak terlepas dari nuansa fiqih yang masih kental mewarnai pemikiran para hakim pengadilan agama. Kaidah fiqih yang dijadikan dasar hakim dalam memutus itsbat nikah poligami antara lain kaidah fiqih yang menyatakan bahwa: *"hukum itu mengikuti kemaslahatan yang kuat,"* kaidah ushul fiqih yang menyatakan bahwa *"kemudharatan itu harus dihilangkan,"* dan kaidah *"menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendapat kemaslahatan"*.

#### **c. Tercapainya kepastian hukum**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP secara normatif perkawinan "harus" dicatat oleh pejabat yang berwenang. Tidak tercatatnya perkawinan tersebut tidak otomatis menyebabkan tidak sahnya suatu perkawinan. Perkawinan dianggap sah menurut agama Islam, akan tetapi perkawinan tersebut di mata hukum positif dianggap tidak pernah ada dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum.

Hakim berpendirian bahwa perkawinan yang tidak disertai dengan kepastian hukum akan mengakibatkan terganggunya hak-hak anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, juga terhadap hak-hak isteri dari perkawinan poligami tersebut. Oleh karenanya demi tercapainya kepastian hukum terhadap para pihak dan kejelasan akibat hukum

perkawinan tersebut, hakim setelah memeriksa perkara tersebut, dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami.

Terhadap pengajuan itsbat nikah, adakalanya hakim menolak permohonan tersebut. Adapun alasan yang dipakai sebagai pertimbangan hakim untuk menolak adalah lebih kepada syarat masing-masing rukun perkawinan. Dalam salah satu kasus itsbat nikah poligami yaitu perkara Nomor 377/Pdt.G/2002/PA.Smn, alasan penolakan permohonan adalah bahwa sewaktu pernikahan poligami sirri dilangsungkan, wanita tersebut masih terikat perkawinan dengan orang lain. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 9 UUP dan Pasal 40 huruf (a) KHI terdapat larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Dengan demikian, penolakan hakim didasarkan pada pelanggaran rukun bukan pada pelanggaran prosedur seperti tidak adanya ijin dari pengadilan agama atau persetujuan isteri sebelumnya.

#### **4. Perlindungan Hukum terhadap para Isteri dalam Penetapan Itsbat Nikah Poligami**

Secara umum itsbat nikah diajukan dalam bentuk permohonan dan terhadapnya diperiksa secara volunter. Akan tetapi terhadap itsbat nikah poligami karena di dalamnya mengandung sengketa, maka tidak diajukan dalam bentuk permohonan. Perkara itsbat nikah poligami diajukan dalam bentuk gugatan dan diperiksa serta diputus secara kontentius dengan melibatkan suami, isteri dan isteri baru yang dimintakan itsbat nikahnya sebagai pihak. Dijadikannya suami, isteri dan isteri baru sebagai pihak dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masing-masing serta memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk melakukan upaya hukum.

Pada prinsipnya, dengan adanya perkawinan, maka akan melahirkan hak-hak dan kewajiban antara suami dengan isteri secara bertimbal balik. Demikian juga dengan



dilangsungkannya perkawinan lebih dari seorang, maka dari suami tentunya akan dituntut untuk memenuhi hak-hak para isteri beserta anak-anaknya secara adil. Adapun adil yang dimaksudkan adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam urusan nafkah dan pembagian waktu kunjung.

Untuk menentukan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan para isteri dan kesanggupan berlaku adil, maka yang dipakai oleh hakim sebagai ukuran obyektif hanyalah pernyataan tertulis dari suami beserta surat keterangan mengenai kekayaan (penghasilan) dari suami yang disertai dengan bukti-bukti lain seperti surat keterangan Pajak Penghasilan.

Perlindungan hukum terhadap para isteri dalam perkara itsbat nikah poligami diwujudkan dalam berbagai persyaratan yang harus dipenuhi ketika itsbat nikah tersebut diajukan. Dalam perkara ini, adanya persetujuan dari isteri dan pernyataan dari suami untuk dapat berlaku adil merupakan persyaratan yang mutlak diperlukan. Persetujuan isteri tersebut dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan di depan sidang pengadilan. Apabila persetujuan diberikan secara lisan, harus diucapkan secara langsung di muka sidang pengadilan sesuai dengan bunyi Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975. Persetujuan tertulis dinyatakan dengan surat yang ditandatangani oleh isteri sebelumnya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pengadilan biasanya mendengar langsung persetujuan dari isteri tersebut di depan sidang pengadilan. Di samping itu, Pengadilan sebagai instansi yang akan memutus perkara itsbat nikah poligami, harus memanggil dan mendengar saksi atau isteri-isteri yang bersangkutan.

Untuk mengetahui ada tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya adalah dengan meminta surat pernyataan yang dibuat oleh suami yang bentuk dan pembuatannya ditetapkan untuk kepentingan tersebut berdasarkan Pasal 41 PP

Nomor 9 Tahun 1975. Suami dalam hal ini tinggal mengisi data-datanya yang diperlukan dan selanjutnya menandatangani disaksikan dua orang saksi. Pernyataan ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi isteri untuk menuntut pemulihan keadilan melalui pengadilan apabila kemudian hari suami menyalahi ikrar jaminan tersebut karena berlaku diskriminatif terhadap salah seorang isteri-isteri tersebut.

Terhadap pelaksanaan prinsip adil dalam perkawinan lebih dari seorang ini, Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk mengawasinya, karena hakim pengadilan agama adalah hakim perdata yang bersifat pasif, artinya ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karenanya, apabila di kemudian hari si suami menyalahi ikrar jaminan berlaku adil, maka isteri atau isteri-isteri dapat menuntut pemulihan keadilan itu pada pengadilan.

Apabila dicermati dalam berbagai perkara itsbat nikah poligami ini sebenarnya telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan prosedural termasuk juga syarat-syarat poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 55-59 KHI, Pasal 3, 4, 5 UUP dan Pasal 40-44 PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu tidak adanya izin dari Pengadilan Agama, persetujuan dari isteri serta alasan-alasan yang membenarkan seseorang untuk menikah lebih dari seorang.

Menurut hakim Pengadilan Agama, tidak terpenuhinya syarat-syarat poligami, tidaklah menjadikan perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Dengan pertimbangan guna melindungi kepentingan masing-masing pihak, maka izin pengadilan dan persetujuan isteri yang mestinya harus diberikan pada saat akan dilangsungkannya pernikahan, dapat diberikan pada saat pemeriksaan itsbat nikah poligami. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya bahwa "*Izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang dilakukan lebih dahulu*". Hal ini berarti bahwa izin Pengadilan Agama yang diberikan kemudian, setelah terjadinya perkawinan poligami, nilai hukumnya sama dengan izin yang diberikan sebelumnya.

Dalam hal pengajuan itsbat nikah dikabulkan, maka hakim akan menjatuhkan putusan akhir, antara lain menyatakan sahnya perkawinan dan memerintahkan dilakukannya pencatatan perkawinan. Dalam hal ini, PPN yang berhak melakukan pencatatan itsbat nikah poligami adalah PPN pada KUA kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal isteri, bukan PPN wilayah tempat terjadinya perkawinan (Surat direktur Urusan agama Islam Nomor DII/2HK.03.4/2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989). Hal ini sesuai dengan asas melindungi pihak isteri, kecuali dalam hal tempat kediaman isteri tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka pencatatan nikahnya dilakukan oleh PPN wilayah tempat tinggal suami.

Dengan telah dikabulkannya itsbat nikah poligami, maka perkawinan poligami di bawah tangan tersebut mendapat pengakuan sah secara hukum sehingga mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum sebagaimana perkawinan yang sah, berlaku surut terhitung semenjak dilangsungkannya akad nikah. Demikian juga dengan telah dicatatkannya perkawinan, maka perkawinan itu mempunyai akta nikah yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak, membebani kewajiban, menetapkan akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan serta menjatuhkan sanksi pidana jika terjadi pelanggaran.

#### **IV. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sekalipun dalam itsbat nikah poligami telah terjadi pelanggaran prosedur dan syarat yang ditentukan dalam pernikahan lebih dari seorang, akan tetapi apabila pernikahan poligami di bawah tangan tersebut telah memenuhi ketentuan

hukum materiil (hukum *munakahat* Islam), maka hakim akan mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami tersebut dengan alasan telah terpenuhinya syarat materiil perkawinan, demi kemaslahatan dan terjaminnya kepastian hukum para pihak.

- b. Dengan adanya itsbat nikah poligami, secara yuridis memberikan perlindungan hukum terhadap isteri berikutnya beserta anak-anaknya. Dengan dicatatkannya perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum serta mempunyai akta nikah yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak, membebani kewajiban; dan menetapkan akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan.

##### **2. Saran**

- a. Lembaga itsbat nikah dibentuk tidak hanya sekedar untuk terlaksananya tertib administrasi, tetapi juga untuk tegaknya hukum perkawinan. Oleh karenanya, hakim sebagai penegak hukum perlu berfikir kritis sehingga dalam penerapannya tidak cenderung memberi peluang pelaku perkawinan poligami liar untuk melegalkan perkawinannya. Karena akan menimbulkan kesan terjadinya pelegalan suatu perbuatan hukum sekalipun telah terjadi pelanggaran syarat dan prosedur.
- b. Perlunya pengaturan yang jelas disertai sanksi tegas terhadap pelanggaran prosedur perkawinan lebih dari seorang. Sehingga ada jaminan perlindungan terhadap para pihak yang beritikad baik, misalnya isteri pertama beserta anak-anaknya, karena dalam kasus itsbat nikah poligami, hak-hak isteri terdahulu beserta anak-anaknya, bagaimanapun berada pada posisi yang tidak menguntungkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Bisri, 1999, *Kamus Bahasa arab Al Bisri*, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Kesembilan, UII Press, Yogyakarta.
- Doi, A. Rahman I, 1996, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hanan, Damsyi, "Permasalahan Itsbat Nikah", *Mimbar Hukum* No. 31 Tahun VIII 1997.
- Mahmood, Tahir, 1972, *Family Law Reform in The Muslim World*, Tripathi, Bombay.
- Nawawi, Rif'at Syauqi, "Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami", dalam Chuzaimah T. Yanggo, 1994, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus.
- Sabiq, Sayyid, 1993, *Fiqih Sunnah*, Jilid Keenam, Al-Ma'arif, Bandung.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.